

# **Implementasi Program Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado**

**ANGGI CHRISYE PITERADJA  
MASJE SILIJA PANGKEY  
JOYCE JACINTA RARES**

***ABSTRACT:** This research comes from the phenomenon that program implementation of pension plan is still not optimal in Manado city. The goal of this research is to find out how the program implementation of pension plan in Manado city. The kind of method that used on this research is qualitative research with measured indicators which are; the insurance of external condition that faced by institute or the implementing agency will not causing major problem, whether for implement to provide adequate resources including source of time, whether the necessary integration of resources are exists, whether the policy that will implemented based on a reliable causal relationship, how many of causal relation becomes, whether minor relationship of interdependence, in deep comprehension and agreement on goals, that tasks have been detailed and placed in the correct order, perfect communication and coordinate, those with power of authority can demand and achieve perfect obedience. Informant researcher are 10 people. Technique of collecting data are used observation, interview and document technique. While the technical analysis used interactive model analysis from Miles and Huberman. based on data analysis development, drawn the conclusion that the lack of human resources to provide maximum service to the participants claim, which lack of socialization implemented, in its implementation this program is not able to achieve the goals for ensure the workers in old age, causing by new regulation that manage the implementation of JHT program. Good communication between peer employees has been consist. Also, good cooperation with related agencies is occurred. With assigning tasks on each employer has been set according their position. The recommendation that human source possessed to be further enhanced. Socialization is endeavoured thoroughly to all levels of society working both formal and informal sectors to be further improved. it is concern to review the rules of government that organize about the implementation of old age program.*

***Keywords :** Implementation, Of Old Age Program, BPJS Ketenagakerjaan*

## **PENDAHULUAN**

Tujuan Pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang dimaksud tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Wujud dari peningkatan kesejahteraan tersebut adalah dengan dibuatnya suatu jaminan sosial untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi mereka yang bekerja. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi misi negara untuk melaksanakannya.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Umumnya, negara berkembang membangun program jaminan sosial

berdasarkan funded *social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan hal itu terlihat masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal maupun informal. Negara Indonesia adalah salah satu dari negara berkembang yang menerapkan program tersebut dimana pemerintah membuat beragam program jaminan sosial, salah satunya adalah program jaminan hari tua. Seiring dengan usaha pemerintah untuk ikut serta menjamin sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial, kita ketahui bersama peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Maka dari itu kepada tenaga kerja perlu diberikan peningkatan kesejahteraannya sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Di Indonesia juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan para mereka

yang telah lanjut usia. Kendala yang dihadapi Indonesia di antaranya adalah relatif rendahnya tingkat kekayaan finansial dan kekayaan bersih hari tua. Namun Indonesia tetap dipandang memiliki potensi tumbuh lebih tinggi saat masalah-masalah ini dapat teratasi. Apalagi peraturan telah memiliki komitmen dalam memecahkan masalah, oleh karena itu program ini memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Melihat beberapa aspek tersebut maka melalui program jaminan hari tua sebagai suatu kebijakan yang dibuat sesuai dengan fenomena yang terjadi seperti yang sudah diuraikan di atas, dimana dilakukannya dan dibuat program jaminan hari tua ini dengan harapan dapat memberikan keringanan bahkan jaminan bagi setiap pekerja dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat resiko sosial. Dengan begitu program ini juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Program jaminan hari tua berfungsi untuk memberikan kesejahteraan bagi para pekerja ketika mereka memasuki usia pensiun nanti. Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan adalah institusi berbentuk badan hukum publik dan mencakup seluruh pekerja formal maupun informal, yang dimaksud pekerja formal adalah penduduk yang bekerja di perusahaan atau badan-badan lain yang secara formal memiliki usaha, koperasi dan sebagainya dengan ikatan atau kontak kerja yang dibuat secara formal. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dalam usaha perorangan atau badan-badan yang dengan standar hukum tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan ikatan kerja tidak secara resmi diikat oleh suatu kontrak tertulis atau peraturan tertulis. Kelompok kerja informal termasuk pedagang, pengecer, petani, nelayan dan sebagainya. Jaminan

sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas dalam bekerja.

Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2015 tentang peraturan penyelenggaraan program jaminan hari tua yang kemudian direvisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 untuk menampung aspirasi pekerja yang menginginkan agar jika mereka mengalami pemutusan hubungan kerja dapat mencairkan dana jaminan hari tua yang tidak bisa dilakukan dalam aturan sebelumnya. Sedangkan dalam revisi tersebut, para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau berhenti bisa mencairkan jaminan hari tua satu bulan setelah mereka terkena pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 juga menjelaskan soal pengaturan pencairan manfaat program jaminan hari tua bagi pekerja atau buruh yang mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia termasuk yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja.

Menurut Hogwood dan Gann (1984) bahwa konsep kebijakan mengandung 10 pengertian atau makna, secara khusus kebijakan sebagai program. Menurut mereka bahwa *“Programme a defined and relatively specific sphere of government activity involving a particular package of legislation, organization, and resources. Programmes are usually seen as being the means by which governments pursue their broader purposes or ends”* (Brian Hogwood & L. A. Gann, 1984 : 13-18). (Program didefinisikan secara relatif dan spesifik di bidang kegiatan pemerintah yang melibatkan suatu kemasakan atau bentuk tertentu dari undang-undang, organisasi, dan sumber daya. Program biasanya dipandang sebagai sarana pemerintah dalam mengejar tujuan yang lebih luas atau tujuan akhir). Model implementasi

kebijakan menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun (1978). Menurut kedua pakar ini, untuk dapat melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Syarat pertama berkenaan dengan, “jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar”. Beberapa kendala atau hambatan pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksana
2. Syarat kedua adalah “apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumber daya waktu”. Gagasan ini sangat bijaksana karena berkenaan dengan feasibilitas dari implementasi kebijakan.
3. Syarat ketiga “apakah perpaduan sumber-sumber yang di perlukan benar-benar ada”. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumberdaya atau sumber aktor.
4. Syarat keempat adalah “apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal”. Prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi.
5. Syarat kelima adalah “seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi”. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab-akibat, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.

Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.

6. Syarat keenam adalah “apakah hubungan saling ketergantungan kecil”. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, justru implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif apalagi jika hubungan adalah hubungan ketergantungan.
7. Syarat ketujuh adalah “pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Artinya bahwa ada kesepakatan dan kesepakatan dalam mencapai tujuan yang sama.
8. Syarat kedelapan adalah “tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar”. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.
9. Syarat kesembilan adalah “komunikasi dan koordinasi yang sempurna”. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi.
10. Syarat kesepuluh adalah bahwa “pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna”. Artinya bahwa, kekuasaan atau *power* adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan tanpa ada dampak bagi target kebijakan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan

bersifat deskriptif yaitu melakukan wawancara mendalam, pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder, yang kemudian hasil data primer dan sekunder diolah sehingga akan di peroleh data. Dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan program jaminan hari tua. Dan hal tersebut di ukur dari beberapa syarat yang diperlukan dalam implementasi kebijakan yaitu: Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, apakah hubungan saling ketergantungan kecil, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar, komunikasi dan koordinasi yang sempurna, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado. Sebagai bahan pertimbangannya adalah BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan bahkan pelaksana dari program jaminan hari tua.

## **C. Informan Penelitian**

Di dalam penelitian, informan adalah orang yang akan menjadi sumber informasi penelitian yang akan dilaksanakan. Menurut (Moleong 2009: 97) Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini sumber informasinya terdiri dari 10 orang.

## **D. Sumber Data**

Bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

- (a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
- (b) Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi yaitu BPJS Ketenagakerjaan dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- (a) Observasi adalah pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung di tempat penelitian.
- (b) Wawancara adalah meneliti melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan informan kunci melalui daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu.
- (c) Dokumentasi atau dokumenter adalah dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen - dokumen tertulis yang tersedia dilokasi penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga data analisis secara kualitatif dengan menggunakan kata - kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Arikunto 2010), yakni analisis data yang dilakukan

secara terus menerus sejak awal sampai selesainya penelitian secara bersamaan.

- (a) Reduksi Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya yang terfokus pada masalah yang dikaji.
- (b) Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Membuat penyajian data merupakan suatu langkah analisis data. Setelah data dibuat dalam bentuk tabel, bagan, matriks, dan grafik dilakukan tahapan dengan mendiskusikan, yang selanjutnya memberikan interpretasi.
- (c) Penarikan kesimpulan merupakan pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat serta preposisi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak dimulainya sejak proses kontak dengan unit analisis, lalu bersamaan dengan proses tersebut berlangsung kegiatan verifikasi yang kemudian menarik pokok pikiran ataupun memberi solusi dan tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian, sehingga dalam verifikasi dipikirkan kembali selama menulis ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan yang begitu seksama dan bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk membangun kesepakatan inter subyektif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan 10 orang informan yang sudah

diuraikan di atas mengenai implementasi program jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan kota Manado, maka berdasarkan syarat-syarat yang diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan menurut model implementasi yang dikemukakan oleh Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun yaitu: jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, apakah hubungan saling ketergantungan kecil, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar, komunikasi dan koordinasi yang sempurna, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar, hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa apakah faktor lingkungan masyarakat mempengaruhi implementasi program jaminan hari tua. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa, faktor lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan dari program jaminan hari tua, dan kebanyakan dari mereka adalah pekerja mandiri, sedangkan pekerja yang bukan mandiri atau bekerja dalam perusahaan lebih kecil pengaruh yang ditimbulkan untuk implementasi tersebut. Tidak bisa dipungkiri pengaruh itu sampai saat ini ada, namun masih dapat teratasi dan tidak menimbulkan masalah yang besar, dengan cara BPJS Ketenagakerjaan terus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat baik formal

maupun informal, juga mengupayakan pelayanan yang baik kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya program JHT.

tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu, wawancara yang dilakukan dengan informan mengenai implementasi program jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan kota Manado bahwa, pelaksanaan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah baik dalam hal teknisnya menyangkut pelayanan kepada peserta dimana ketersediaan fasilitas yang menunjang pelaksanaan program jaminan hari tua. Namun pemberi pelayanan yang masih kurang, seperti bagian yang melayani klaim hanya 1 orang saja, sedangkan yang dilayani setiap harinya banyak, sehingga harus antri cukup lama.

perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, bahwa apakah hubungan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan instansi-instansi yang berkaitan sudah baik, dalam hal implementasi program jaminan hari tua. Untuk hubungan kerja sama menurut informan yang ada, sudah terjalin dengan baik bahkan saling mendukung pelaksanaan dari BPJS Ketenagakerjaan. seperti masalah iuran yang belum terbayarkan oleh perusahaan, perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjaanya, kepesertaan dan syarat pengklaiman, dari semua bagian yang terkait, hubungan kerja samanya juga sudah baik.

kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal, hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, bahwa program jaminan hari tua ini belum bisa menyelesaikan masalah yang ada, yaitu memberikan kesejahteraan bagi para pekerja ketika pekerja memasuki usia pensiun atau dalam masa sudah tidak produktif lagi. Menurut informan kebanyakan dari pekerja menganggap dana dari program jaminan hari tua ini hanya berupa tabungan sementara yang dapat diambil kapan saja

sesuai dengan regulasi yang baru, tetapi hal itu bertentangan dengan tujuan yang sebenarnya dari program jaminan hari tua ini, dikarenakan pemanfaatan dana yang didapatkan dari program jaminan hari tua bukan digunakan pada saat masa tua, pemahaman dari peserta atau masyarakat yang masih sangat kurang untuk berfikir jangka panjang.

Hasil wawancara, informan mengatakan bahwa dari pelaksanaan program jaminan hari tua ini, selain dapat memberi dampak positif yaitu terpenuhinya kebutuhan finansial dari pekerja, namun di sisi lain dapat memberi dampak negatif, karena regulasi yang baru, tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Jika regulasi yang baru ini terus dibiarkan, maka program jaminan hari tua ini akan kehilangan nilai esensinya atau tujuan dari jaminan hari tua sendiri untuk menjamin kehidupan pekerja saat memasuki usia pensiun atau hari tua mereka.

Hasil wawancara yang diperoleh, informan mengatakan bahwa ketergantungan masyarakat dengan BPJS Ketenagakerjaan sangat kecil, karena sebagian besar peserta atau pekerja menganggap program jaminan hari tua ini hanya berupa tabungan, pekerja juga tidak menggantungkan hidup mereka dengan mengandalkan hanya pada program jaminan hari tua saja.

Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, hasil wawancara yang diperoleh dari informan, bahwa tujuan dari pekerja bahkan tujuan yang hendak diperoleh dari program jaminan hari tua ini yaitu untuk menjamin pekerja dalam menikmati masa tua belum dapat dikatakan setuju, karena kebanyakan dari pekerja yang mencairkan dana program jaminan hari tua ini adalah mereka yang masih tergolong dalam usia produktif.

Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Menurut informan, dari hasil wawancara bahwa tugas-tugas dari setiap bagian yang ada dalam kantor BPJS Ketenagakerjaan kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan

prosedur yang ada berdasarkan SOP. Terlebih dalam upaya mengcover seluruh pekerja formal maupun informal.

Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dari wawancara yang diperoleh dari informan menyatakan bahwa komunikasi di antara pegawai yang ada menyangkut dengan pekerjaan di masing-masing bagian terjalin sangat baik, dan koordinasi antara pegawai terbangun dengan baik pula. Begitupun hubungan atasan dengan bawahan telah terjalin komunikasi yang baik baik.

Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Informan menyatakan bahwa kepemimpinan dari pihak yang berwenang sepenuhnya yaitu kepala cabang kantor BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan tugasnya dengan baik, bahkan dapat memberikan arahan dengan baik, dalam otoritasnya sebagai pimpinan di kantor.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada peserta klaim, sehingga pelayanan yang dilakukan juga belum efektif. diakibatkan keterbatasan sumber daya yang ada, terutama dalam perekrutan pegawai masih sedikit
2. Masih kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kepesertaan, terlebih pekerja sektor informal. sebab sosialisasi yang dilaksanakan bagi sektor informal banyak mengalami kesulitan dibanding dengan sektor formal, oleh karena itu bagi pekerja informal belum tersosialisasikan secara maksimal.
3. Dalam implementasinya program ini ternyata belum mampu mencapai tujuannya untuk menjamin para pekerja

di masa tua, diakibatkan oleh adanya regulasi baru yang mengatur pelaksanaan program JHT.

4. Komunikasi di antara sesama pegawai telah terjalin dengan baik, demikian pula atasan ke bawahan telah terjalin dengan baik dan memberikan arahan dengan baik. juga kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait sudah terjalin dengan baik. serta pemberian tugas-tugas di masing-masing pegawai telah di tetapkan sesuai posisinya masing-masing.

### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pengamatan serta kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam implementasi program jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan kota Manado sebagai berikut:

1. Sumberdaya manusia yang dimiliki agar supaya lebih ditingkatkan lagi, agar supaya masyarakat terlayani dengan baik, khususnya dalam pelayanan klaim JHT,
2. Sosialisasi yang diupayakan agar terus dilaksanakan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat yang bekerja baik sektor formal maupun informal agar lebih ditingkatkan lagi, karena jika sosialisasi ini tidak dilaksanakan secara maksimal, maka target yang akan dicapai tidak akan terlaksana.
3. Perlu untuk ditinjau kembali peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan program jaminan hari tua ini. Sebab jika hal ini tidak diperhatikan secara serius, maka program jaminan hari tua akan kehilangan tujuan yang sebenarnya.
4. Kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, Tugas- tugas yang ditempatkan sesuai di masing-masing bidang di kantor, bahkan arahan dari pimpinan, serta komunikasi dengan sesama pegawai

agar supaya lebih ditingkatkan lagi. Karena bagian-bagian ini juga sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan program jaminan hari tua, agarpun program ini merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto. S. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Hogwood. B. W. & Gunn. L. A. 1984. *Policy Analysis For The Real World*. London: Oxford University Press.

Moleong. L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho. R. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan kimia kebijakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

#### **Sumber – sumber lain :**

[www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)